



PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

5.1. PENDAPATAN

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
PAD	243.364.192.996,00	265.920.295.216,86	109,27%	248.944.404.487,59

Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp265.920.295.216,86 atau mencapai 109,27% yang berarti Rp22.556.102.220,86 atau 9,27% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp243.364.192.996,00. Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun anggaran 2021 sebesar Rp265.920.295.216,86 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp248.944.404.487,59 terjadi penurunan sebesar Rp16.975.890.729,27 atau 6,82%.

Perincian anggaran dan realisasi PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.
Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	82.260.000.000,00	87.874.777.059,32	106,83%	90.291.466.033,37
Retribusi Daerah	15.462.633.570,00	17.463.721.195,00	112,94%	15.619.539.719,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.092.455.426,00	16.199.882.796,95	107,34%	15.216.268.562,40
Lain-lain PAD yang sah	130.549.104.000,00	144.381.914.165,59	110,60%	127.817.130.173,12
Total	243.364.192.996,00	265.920.295.216,86	109,27%	248.944.404.487,59

5.1.1.1. Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	82.260.000.000,00	87.874.777.059,32	106,83%	90.291.466.033,07

Realisasi pajak daerah adalah sebesar Rp87.874.777.059,32 atau mencapai 106,83% yang berarti Rp5.614.777.059,32 atau 6,83% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp82.260.000.000,00. Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp87.874.777.059,32 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp90.291.466.033,07 terjadi penurunan sebesar Rp.2.416.688.973,75 atau 2,68%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.1.1.1.
Pajak Daerah**

Pajak Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.01.06. Pajak Hotel	3.940.000.000,00	4.651.995.032,00	118,07%	4.372.533.671,20
4.1.01.07. Pajak Restoran	11.000.000.000,00	12.191.757.300,09	110,83%	11.403.756.266,81
4.1.01.08. Pajak Hiburan	308.000.000,00	416.770.721,00	135,32%	836.732.808,00
4.1.01.09. Pajak Reklame	1.785.000.000,00	2.079.605.858,00	116,50%	1.928.783.033,00
4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan	19.327.000.000,00	20.011.884.363,64	103,54%	20.664.839.579,46
4.1.01.11. Pajak Parkir	700.000.000,00	664.012.063,00	94,86%	808.361.637,00
4.1.01.12. Pajak Air Tanah	280.000.000,00	324.727.266,40	115,97%	329.465.566,60
4.1.01.15. PBB P2	21.350.000.000,00	22.852.741.293,00	107,04%	22.379.466.936,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

4.1.01.16. BPHTB	23.570.000.000,00	24.681.283.162,19	104,71%	27.567.526.535,00
Jumlah	82.260.000.000,00	87.874.777.059,32	106,83%	90.291.466.033,07

1. Realisasi pajak hotel sebesar Rp4.651.995.032,00 atau mencapai 118,07% yang berarti Rp711.995.032,00 atau 18,07% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.940.000.000,00. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.651.995.032,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2020 sebesar Rp4.372.533.671,20 atau terjadi peningkatan sebesar Rp279.461.360,80 atau 6,39 %.
2. Realisasi pajak restoran sebesar Rp12.191.757.300,09 atau mencapai 110,83% yang berarti Rp 1.191.757.300,09 atau 10,83% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp11.000.000.000,00. Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2021 sebesar Rp12.191.757.300,09 dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2020 sebesar Rp11.403.756.266,81 atau terjadi peningkatan sebesar Rp788.001.033,28 atau 6,91%.
3. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2021 sebesar Rp416.770.721,00 atau mencapai 135,32% yang berarti Rp108.770.721,00 atau 35,32% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp308.000.000,00. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2021 sebesar Rp416.770.721,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan tahun 2020 sebesar Rp836.732.808,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp 419.962.087 atau 50,19%. Masa pandemi covid19 menyebabkan pajak hiburan turun dratis karena tidak boleh beroperasi.
4. Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.079.605.858,00 atau mencapai 116,50% yang berarti sebesar Rp294.605.858,00 atau 16,50% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.785.000.000,00. Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.079.605.858,00 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2020 sebesar Rp1.928.783.033,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp150.822.825,00 atau 7,82%.
5. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2021 sebesar Rp20.011.884.363,64 atau mencapai 103,54% yang berarti Rp684.884.363,64 atau 3,54% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp19.327.000.000,00. Pencapaian pajak penerangan jalan sesuai dengan potensi riil.

Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2021 sebesar Rp20.011.884.363,64 dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan tahun 2020 sebesar Rp20.664.839.579,46 atau terjadi penurunan sebesar Rp652.955.215,82 atau 3,16%

6. Realisasi pajak parkir tahun anggaran 2021 sebesar Rp664.012.063,00 atau mencapai 94,86% yang berarti Rp35.987.937,00 atau 5,14% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp700.000.000,00. Pencapaian pajak Parkir sesuai dengan potensi riil. Realisasi Pajak Parkir Per 31 Desember tahun anggaran 2021 sebesar Rp664.012.063,00 dibandingkan dengan realisasi pajak parkir tahun 2020 sebesar Rp808.361.637,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp144.349.574,00 atau 17,86%.
7. Realisasi pajak air tanah sebesar Rp324.727.266,40 atau mencapai 115,97% yang berarti Rp 44.727.266,40 atau 15,97% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp280.000.000,00. Pencapaian target kinerja pajak air tanah sesuai dengan potensi riil. Realisasi pajak air tanah tahun anggaran 2021 sebesar Rp.324.727.266,40 dibandingkan dengan realisasi pajak air tanah tahun 2020 sebesar Rp329.465.566,60 terjadi penurunan sebesar 4.738.300,20 atau 1,44%.
8. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2021 sebesar Rp22.852.741.293,00 atau mencapai 107,04% yang berarti Rp1.502.741.293,0 atau 7,04% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp21.350.000.000,00. Pencapaian target kinerja PBB dipengaruhi adanya rangsangan berupa reward untuk wajib pajak, dan petugas pungut dan petugas penagih piutang PBB sampai dengan tahun 2021. Realisasi pajak PBB tahun anggaran 2021 sebesar Rp22.852.741.293,00 dibandingkan dengan realisasi pajak PBB tahun 2020 sebesar Rp22.379.466.936,00 atau terjadi kenaikan sebesar 473.274.357,00 atau 2,11%.

Catatan :

SPPT PBB/SKPD yang terbit diawal tahun 2021 sebesar Rp. 25.218.222.715,00 –

- Terdapat mutasi pelayanan untuk masa pajak tahun 2021 sebesar Rp232.182.027,00 yang menambah jumlah SSPT PBB awal tahun dan terdapat mutasi pelayanan Rp1.015.276.843,00 yang mengurangi jumlah SPPT PBB awal tahun 2021.

- Terdapat mutasi pelayanan untuk masa pajak sebelum tahun 2021 yang menambah jumlah SPPT PBB yang telah diterbitkan pada awal tahun 2021 yaitu sebesar Rp134.172.793,00.

Terdapat setoran PBB sebesar Rp313.657,00 yang merupakan pembayaran PBB untuk masa pajak tahun sebelum 2002 dan pembayaran tersebut hanya dicatat dalam rekapitulasi piutang PBB karena dalam laporan piutang PBB yang diakui dalam pencatatan laporan piutang hanya mulai tahun 2002 sampai dengan 2001.

9. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp24.681.283.162,19 atau mencapai 104,71% atau mencapai atau 4,71% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp23.570.000.000,00. Pencapaian target kinerja bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipengaruhi adanya permohonan pengalihan hak atas tanah dan bangunan baik melalui proses waris, pembagian hak bersama, hibah dan transaksi jual beli. Namun demikian potensi ini sangat tergantung jumlah transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang terjadi di masyarakat. Semakin banyak transaksi yang terjadi semakin besar potensi pendapatan yang diperoleh dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp24.681.283.162,19 dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp27.567.526.535,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp2.886.243.372,81 atau 10.47%.

5.1.1.2. Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Retribusi Daerah	15.462.633.570,00	17.463.721.195,00	112.94%	15.619.539.719,00

Realisasi retribusi daerah adalah sebesar Rp17.463.721.195,00 atau 112.94% yang berarti Rp2.001.087.625,00 atau 12,94% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp15.462.633.570,00. Realisasi retribusi daerah anggaran 2021 sebesar Rp17.463.721.195,00 dibandingkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp15.619.539.719,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.844.181.476,00 atau lebih tinggi sebesar 11.81%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 obyek pendapatan retribusi tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.
Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.01. Jasa Umum	2.780.347.500,00	3.456.971.597,00	124,34%	6.004.754.409,50
4.1.02.02. Jasa Usaha	11.680.786.070,00	13.328.090.598,00	114,10%	8.786.735.909,50
4.1.02.03. Perizinan tertentu	1.001.500.000,00	678.659.000,00	67,76%	828.049.400,00
Jumlah	15.462.633.570,00	17.463.721.195,00	112,94 %	15.619.539.719,00

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	151.000.000,00	173.343.000,00	114,80%	176.011.500,00
4.1.02.01.04. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.880.250.000,00	2.489.454.000,00	132,40%	1.483.381.612,50
4.1.02.01.05. Retribusi Pelayanan Pasar/Kios	62.800.500,00	91.072.100,00	145,02%	3.565.623.620,00
4.1.02.01.06. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	468.905.000,00	460.857.200,00	98,28%	506.360.800,00
4.1.02.01.11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	61.060.000,00	57.716.000,00	94,52%	66.236.980,00
4.1.02.01.13. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menawa Telekomunikasi	156.332.000,00	184.529.297,00	118,04%	207.139.897,00
Jumlah	2.780.347.500,00	3.456.971.597,00	124,34%	6.004.754.409,50

1. Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp173.343.000,00 atau mencapai 114.80% yang berarti Rp22.343.000,00 atau 14.80% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp151.000.000,00. Realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2021 sebesar Rp173.343.000,00 dibandingkan dengan realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2020 sebesar Rp176.011.500,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp2.668.500 atau 1.52%.
2. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp2.489.454.000,00 atau mencapai 132.40% yang berarti Rp609.204.000,00 atau 32,40 % lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.880.250.000,00. Pencapaian target kinerja retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.489.454.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2020 sebesar Rp1.483.688.612,50 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.006.072.387,50 atau 67.82%. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak dapat tercapai sepenuhnya di karenakan kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan jalan nasional tidak dapat dipergunakan untuk lokasi perpajakan sehingga potensi jalan Nasional di lepaskan dari pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan disebabkan kenaikan jumlah kunjungan kepusat perdagangan dan wisata di kota Madiun karena terbangunnya cluster ikonik di beberapa wilayah Kota Madiun seperti Malioboro Jalan Pahlawan dan kondisi wabah covid-19 yang semakin terkendali dengan diterapkannya program Vaksinasi dan PPKM di wilayah Kota Madiun yang mampu menurunkan angka penularan Covid 19 dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat sehingga menyebabkan kenaikan di segala bidang aktivitas utamanya perdagangan dan wisata di Kota Madiun.
3. Realisasi pelayanan Pasar yang terdiri atas Retribusi Kios sebesar Rp91.072.100,00 atau mencapai 145.02% yang berarti Rp28.271.600,00 atau 45,02% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp62.800.500,00. Realisasi retribusi pelayanan Pasar yang terdiri atas Retribusi Kios tahun anggaran 2021 sebesar Rp91.072.100,00 Retribusi Kios dapat tercapai sepenuhnya dikarenakan kepatuhan penyewa kios membayar retribusi Sewa Kios. Realisasi retribusi pelayanan Pasar yang terdiri atas Retribusi Kios tahun anggaran 2020 belum ada realisasi.
4. Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp460.857.200,00 atau mencapai 98.28% yang berarti Rp8.047.800,00 atau 1,72% lebih rendah dibandingkan dengan target

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp468.905.000,00. Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun anggaran 2021 sebesar Rp460.857.200,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2020 sebesar Rp506.360.800,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp45.503.600,00 atau 8,99%.

5. Realisasi retribusi ulang tera sebesar Rp57.716.000,00 atau mencapai 94.52% yang berarti Rp3.344.000,00 atau 5,48% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp61.060.000,00. Realisasi retribusi ulang tera sebesar Rp57.716.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp66.236.980,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp8.520.980,00 atau 12.86%. Hal ini sesuai dengan potensi riil.
6. Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp184.529.297,00 atau mencapai 118.04% yang berarti Rp28.197.297,00 atau 18.04% lebih tinggi dibandingkan dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp156.332.000,00. Realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi anggaran 2021 sebesar Rp184.529.297,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2020 sebesar Rp207.139.897,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp22.610.600,00 atau 10,92%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji dibawah ini.

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.777.566.070,00	7.984.184.727,00	117,80%	7.210.792.116,50
4.1.02.02.02. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	3.582.395.000,00	3.469.849.578,00	96,86%	0,00
4.1.02.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir	668.960.000,00	1.082.708.400,00	161,85%	751.334.000,00
4.1.02.02.07. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	35.890.000,00	32.701.000,00	91,11%	37.110.000,00
4.1.02.02.09. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	615.975.000,00	758.646.893,00	123,16%	787.499.793,00
Jumlah	11.680.786.070,00	13.328.090.598,00	114,10%	8.786.735.909,50

1. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah dikelola sebesar Rp7.984.184.727,00 dikelola oleh beberapa OPD terdiri dari :

4.1.02.02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.02.01. Dinas PU	3.000.000,00	5.085.000,00	169,50%	10.005.000,00
4.1.02.02.01. Dinas Dishub	0,00	0,00	0,00	51.079.740,00
4.1.02.02.01. Dinas Kebudayaan	34.025.000,00	114.325.000,00	336,00%	254.625.000,00
4.1.02.02.01. BKD	30.000.000,00	44.150.000,00	147,17%	96.875.000,00
4.1.02.02.01. BPKAD	4.165.474.070,00	4.956.757.053,00	119,00%	3.883.245.156,50
4.1.02.02.01. Kec,Kartoharjo	1.203.000.000,00	1.318.854.359,00	109,63%	1.307.796.690,00
4.1.02.02.01. Kec.Manuhario	613.000.000,00	679.640.115,00	110,87%	659.221.080,00
4.1.02.02.01. Kec,Taman	700.000.000,00	838.530.200,00	119,79%	918.887.850,00
4.1.02.02.01. Dinas Pertanian	29.067.000,00	26.843.000,00	92,35%	29.056.600,00
Jumlah	6.777.566.070,00	7.984.184.727,00	117,80%	7.210.792.116,50

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp5.085.000,00 atau mencapai 169.50% yang berarti Rp2.085.000,00 atau 69.50% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp5.085.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2020 sebesar Rp10.005.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp4.920.000,00 atau 49.18%. Hal ini dikarenakan adanya reklas realisasi asrama haji yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum beralih ke Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga di tahun anggaran 2021.

b. Dinas Kebudayaan ,Pariwisata,Kebudayaan dan Olah Raga

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp114.325.000,00 atau mencapai 336,00% yang berarti Rp80.300.000,00 atau 236,00% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp34.025.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2021

sebesar Rp114.325.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp254.625.000,00 terjadi penurunan atau 55,10%. Hal ini dikarenakan adanya reklas dari realisasi arsrama haji yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum beralih ke dinas kebudayaan, pariwisata, kebudayaan dan olah raga.

c. **Badan Kepegawaian dan PSDM**

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp44.150.000,00 atau mencapai 147,17% yang berarti Rp14.150.000,00 atau 47,17% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp30.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp44.150.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2020 sebesar Rp96.875.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp52.725.000,00 atau 54,43%.

d. **Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp4.956.757.053,00 atau mencapai 119.00% yang berarti Rp791.282.983,00 atau 19.00% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.165.474.070,00 Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggran 2021 sebesar Rp4.956.757.053,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2020 sebesar Rp3.883.245.156,50 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.073.511.896,50 atau 27,64%. Realisasi ini terdiri atas pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan CARREFOUR yang dikelola oleh PT. KELOLA TAMA PROPERTY yang penerimaannya melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, kerjasama Bangun Guna Serah (BOT). Pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah untuk kawasan hiburan Suncity Festival oleh PT. INDRACO.

e. **Kecamatan Kartoharjo**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan kartoharjo sebesar Rp1.318.854.359,00 atau mencapai 109,63% yang berarti Rp115.854.359,00 atau lebih tinggi 9,63% dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.203.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan kartoharjo terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp11.800.000,00 berupa sewa gedung kecamatan dan realisasi sebesar Rp1.307.054.3590,00 berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi

pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.318.854.359,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2020 sebesar Rp1.307.796.690,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp11.057.669,00 atau 0.85%.

f. **Kecamatan Manguharjo**

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan manguharjo sebesar Rp679.640.115,00 atau mencapai 110.87% yang berarti Rp66.640.115,00 atau 10.87% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp613.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan manguharjo terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp5.700.000,00 adalah berupa sewa gedung kecamatan dan Realisasi sebesar Rp673.940.115,00 adalah berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp679.640.115,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2020 sebesar Rp659.221.080,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp20.419.035,00 atau 3.10%.

g. **Kecamatan Taman**

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah kecamatan taman sebesar Rp838.530.200,00 atau mencapai 119.79% yang berarti Rp138.530.000,00 atau 19,79% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp700.000.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan taman terdiri dari sewa gedung kecamatan dan sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi sebesar Rp8.000.000,00 adalah berupa sewa gedung kecamatan dan realisasi sebesar Rp.830.530.200,00 berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp838.530.200,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2020 sebesar Rp918.887.850,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp80.357.650,00 atau 8.75 %.

h. **Dinas Pertanian**

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah dinas pertanian sebesar Rp26.843.000,00 atau mencapai 92.35% yang berarti Rp2.224.000,00 atau 7.65% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp29.067.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp26.843.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi

pemakaian kekayaan daerah tahun 2020 sebesar Rp29.056.600,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp2.213.600,00 atau 7.62 %.

2. Realisasi retribusi pasar grosir dan/pertokoan Dinas Perdagangan sebesar Rp3.469.849.578,00 atau mencapai 96.86% yang berarti Rp112.545.422,00 atau 2,69% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.582.395.000,00. Realisasi retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan dinas perdagangan tahun 2021 sebesar Rp3.469.849.578,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan dinas perdagangan tahun 2020 sebesar Rp 3.565.623.620,00 terjadi penurunan sebesar Rp95.774.042,00 atau 2,69 %. Retribusi pelayanan pasar dinas perdagangan di tahun 2020 mengalami perubahan dimana realisasi retribusi pelayanan pasar di tahun 2020 masuk di retribusi jasa umum . hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 sehingga tidak tersaji di tabel retribusi jasa usaha namun tersaji di tabel retribusi jasa umum. Realisasi retribusi pasar grosir dan Pertokoan tahun anggaran 2021 mengalami penurunann di karenakan berkurangnya intensifikasi penagihan sewa di Pasar Besar Madiun, rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar angsuran pembangunan di pasar logam jaya dan banyaknya toko atau bedag di pasar srijaya banyak yang tutup karena adanya pandemi covid 19 sehingga kondisi pasar sepi.
3. Retribusi tempat khusus parkir meliputi lahan parkir parkir Sumber Umis sebesar Rp1.082.708.400,00 atau mencapai 161,85% yang berarti Rp413.748.400,00 atau 61,85% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp668.960.000,00. Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi tempat parkir khusus tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.082.708.400,00 dibandingkan dengan realisasi tempat parkir khusus tahun 2020 sebesar Rp751.334.000,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp331.374.400,00 atau 44,10 %.
4. Realisasi retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp32.701.000,00 atau mencapai 91,11% yang berarti Rp3.189.000,00 atau 8,89% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp35.890.000,00. Realisasi retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2021 sebesar Rp32.701.000,00 dibandingkan dengan Realisasi retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2020 sebesar Rp37.110.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp 4.409.000,00 atau 11,88%. Realisasi ini sesuai potensi riil.
5. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebesar Rp758.646.893,00 atau mencapai 123,16% yang berarti Rp 142.671.893,00 atau 23.16% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp615.975.000,00. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2021

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

sebesar Rp758.646.893,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2020 sebesar Rp787.499.793,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp28.852.900,00 atau 3,66% .Hal ini sesuai dengan potensi riil.

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.02.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	677.159.000,00	67,72%	826.249.400,00
4.1.02.03.03. Retribusi Izin Trayek	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.800.000,00
Jumlah	1.001.500.000,00	678.659.000,00	67,76%	828.049.400,00

1. Realisasi retribusi IMB sebesar Rp677.159.000,00 atau mencapai 67,72% yang berarti Rp322.841.000,00 atau 32,28% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Hal ini di karenakan karena nilai retribusi IMB dari bulan Agustus sampai dengan Desember tidak dikenakan pemohon sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung

Realisasi retribusi IMB tahun anggaran 2021 sebesar Rp677.159.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi IMB tahun 2020 sebesar Rp826.249.400,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp149.090.400,00 atau 18,04%.

2. Realisasi izin trayek sebesar Rp1.500.000,00 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.500.000,00. Realisasi izin trayek tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.500.000,00 dibandingkan dengan realisasi izin trayek tahun 2020 sebesar Rp1.800.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp300.000,00 atau 16,66%.

5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.092.455.426,00	16.199.882.796,95	107,34%	15.216.268.562,40

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp16.199.882.796,95 atau 107,34% yang berarti 7,34% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar

Rp15.092.455.426,00.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.3.01.01 PDAM	6.550.840.385,00	6.785.202.375,00	103,58%	6.550.840.385,00
4.1.3.01.02 BPR Bank Daerah	1.238.131.353,00	1.988.245.305,00	160,58%	1.361.944.488,00
4.1.3.01.03 Aneka Usaha	841.578.307,00	877.387.858,00	104,26%	841.578.308,00
4.1.3.02.01 Bank Jatim	6.461.905.381,00	6.549.047.258,95	101,35%	6.461.905.381,40
Total	15.092.455.426,00	16.199.882.796,95	107,34%	15.216.268.562,40

1. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM sebesar Rp6.785.202.375,00 atau mencapai 103,58% yang berarti Rp234.361.990,00 atau 3,58% lebih tinggi dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp6.550.840.385,00.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2021 dari PDAM dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Per 31 Desember 2020 yang telah diaudit tanggal 11 Pebruari 2021 Nomor 00008/3.0401/AU.2/05/1051-1/0/II/2021. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM anggaran 2021 sebesar Rp6.785.202.375,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun 2020 sebesar Rp6.550.840.385,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp234.361.990,00 atau 3,58%.

2. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah sebesar Rp1.988.245.305,00 atau mencapai 160,58% yang berarti Rp750.113.952,00 atau 60,58% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran

2021 sebesar Rp1.238.131.353,00. Penetapan target anggaran tahun anggaran 2021 dari PD. BPR Bank Daerah dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PD. Bank Pasar per 31 Desember 2020 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp Rp1.988.245.305,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun 2020 sebesar Rp1.361.944.488,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp626.300.817 atau 45,99 %.

3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha sebesar Rp877.387.858,00 atau mencapai 104,26% yang berarti Rp35.809.551,00 atau 4,26% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp841.578.307,00.

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2021 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Aneka Usaha per 31 Desember 2020 yang telah diaudit tanggal 13 Januari 2021 Nomor 00002/1.2016/AU.2016/AU.2/05/0744-7/1/I/2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha tahun anggaran 2021 sebesar Rp877.387.858,00 dibandingkan dengan Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha tahun anggaran 2020 sebesar Rp841.578.308,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp35.809.550,00 atau 4,26 %.

4. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun sebesar Rp6.549.047.258,95 atau mencapai 101,35% yang berarti Rp87.141.877,95 atau 1,35% lebih tinggi dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp6.461.905.381,00.

Realisasi ini berdasarkan Surat dari Direksi Bank Jatim Pusat Surabaya Tahun Buku 2021 yang memuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2020 tanggal 3 Mei 2021 Nomor 1 tahun 2021

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun anggaran 2021 sebesar Rp6.549.047.258,95 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun 2020 sebesar Rp6.461.905.381,40 atau terjadi peningkatan sebesar Rp87.141.877,55 atau 1,35 %.

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Lain-lain PAD yang sah	130.549.104.000,00	144.381.914.165,59	110,60%	127.817.130.173,12

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp144.381.914.165,59 atau 110,607% yang berarti Rp13.832.810.165,59 atau 10,60% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp130.549.104.000,00. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp144.381.914.165,59 apabila dibandingkan dengan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp127.817.130.173,12 terjadi kenaikan sebesar Rp16.564.783.992,47 atau 12,96%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 per obyek pendapatan tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.4.1.1
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
a. 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	28.000.000,00	38.983.000,00	139,23%	37.410.000,00
b. 4.1.04.05 Jasa giro	1.500.000.000,00	84.665.913,20	5,64%	1.355.620.963,85
c. 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	106.912.536,22	106,91%	128.290.315,83
d. 4.1.04.07 Pendapatan Bunga	9.000.000.000,00	9.099.624.602,86	101,11%	9.026.027.396,74
e. 4.1.04.11 Pendapatan Denda	0,00	70.676.998,78	0,00%	0,00
f. 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	159.920.658,00	0,00%	97.997.142,32

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
g. 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	168.330.911,73	00,00%	1.285.841.934,95
h. 4.1.04.16 Pendapatan BLUD	119.921.104.000,00	133.838.401.524,40	111,61%	115.885.942.419,43
i. 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Lengkap Peraturan Daerah	0,00	814.398.020,40	0,00%	0,00
Jumlah	130.549.104.000,00	144.381.914.165,59	110,60%	127.817.130.173,12

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.4.1.2
Realisasi Pendapatan lain-lain PAD yang sah

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. Dinas Kesehatan				
a. 4.1.04.16 Pendapatan BLUD	119.921.104.000,00	133.838.401.524,40	111,61%	115.885.942.419,43
2.BAPENDA				
a. 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	159.920.658,00	0,00%	97.997.142,32
3.BKAD				
a. 4.1.04.05 Jasa giro	1.500.000.000,00	84.665.913,20	5,64%	1.355.620.963,85
b. 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	100.000.000,00	106.912.536,22	106,91%	128.290.315,83
c. 4.1.04.07 Pendapatan Bunga	9.000.000.000,00	9.099.624.602,86	101,11%	9.026.027.396,74

4.1.04 Lain-Lain PAD yang sah Per OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
d. 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian	0,00	168.330.911,73	0,00%	1.282.059.258,95
e. 4.1.04.16 Denda Keterlambatan	0,00	70.676.998,78	0,00%	3.782.676,00
f. 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Lengkap Peraturan Daerah	0,00	814.398.020,40	0,00%	0,00
4.Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian				
a. 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	28.000.000,00	38.983.000,00	139.23%	37.410.000,00
Jumlah	130.549.104.000,00	144.381.914.165,59	110,60%	127.817.130.173,12

1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- a. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD .

Realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp133.838.401.524,40 atau mencapai 111,61% yang berarti Rp13.917.297.524,40 atau 11,61% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp119.921.104.000,00. Realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran 2021 sebesar Rp133.838.401.524,40 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran 2020 sebesar Rp115.885.942.419,43 terdapat kenaikan sebesar Rp17.952.459.104,97 atau sebesar 15.49%.

Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD .

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 per Puskesmas tersaji dibawah ini.

4.1.04 Lain-Lain PAD yang	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Manguharjo	1.911.520.000,00	1.942.592.613,73	101,63%	1.923.470.713,20
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngegong	1.198.000.000,00	1.168.970.069,44	97,58%	1.114.387.590,08
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Demangan	1.823.000.000,00	1.761.216.535,11	96,61%	1.769.132.009,93
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Banjarejo	2.135.000.000,00	2.070.816.135,94	96,99%	2.075.448.734,89
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Sukosari	1.497.000.000,00	1.483.311.806,70	99,09%	1.586.513.706,83
4.1.04.16 Pendapatan BLUD Puskesmas Tawangrejo	1.356.584.000,00	1.361.539.796,51	100,37%	1.443.179.887,32
4.1.04.16 Pendapatan BLUD RSUD	110.000.000.000,00	124.049.954.566,97	112,77%	105.973.809.777,18
Jumlah	119.921.104.000,00	133.838.401.524,40	111,61%	115.885.942.419,43

- Realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.942.592.613,73 atau mencapai 101,63% yang berarti Rp31.072.613,73 atau 1,63% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.911.520.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.942.592.613,73 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.923.470.713,20 terdapat kenaikan sebesar Rp19.121.900,53 atau sebesar 0,99%.
- Realisasi pendapatan BLUD puskesmas ngegong tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.168.970.059,44 atau mencapai 97,58% yang berarti Rp29.029.930,56 atau 2,42% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.198.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas ngegong tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.168.970.069,44 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas ngegong tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.114.387.590,08 terdapat kenaikan sebesar Rp54.582.479,36 atau sebesar 4,90%.

- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas demangan tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.761.216.535,11 atau mencapai 96,61% yang berarti Rp61.783.464,89 atau 3,39% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.823.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas demangan tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.761.216.535,11 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas demangan tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.769.132.009,93 terdapat penurunan sebesar Rp7.915.474,82 atau sebesar 0,45%.
- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas banjarejo tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.070.816.135,94 atau mencapai 96,99% yang berarti Rp64.183.864,06 atau 3,01% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.135.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas banjarejo tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.070.816.135,94 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas banjarejo tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.075.448.734,89 terdapat penurunan sebesar Rp4.632.598,95 atau sebesar 0,22%.
- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas sukosari tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.483.311.806,70 atau mencapai 99,09% yang berarti Rp13.688.193,30 atau 0,91% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.497.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas sukosari tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.483.311.806,70 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas sukosari tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.586.513.706,83 terdapat penurunan sebesar Rp103.201.900,13 atau sebesar 6,50%.
- ☑ Realisasi pendapatan BLUD puskesmas tawangrejo tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.361.539.796,51 atau mencapai 100,37% yang berarti Rp4.955.796,51 atau 0,37% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.356.584.000,00. Realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.361.539.796,51 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD puskesmas manguharjo tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.443.179.887,32 terdapat penurunan sebesar Rp81.640.090,81 atau sebesar 5,66%.

- Realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran 2021 sebesar Rp124.049.954.566,97 atau mencapai 112,77% yang berarti Rp14.049.954.566,97 atau 12,77% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp110.000.000.000,00. Realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.942.592.613,73 dibandingkan dengan realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran 2020 sebesar Rp105.973.809.777,18 terdapat kenaikan sebesar Rp18.076.144.789,79 atau sebesar 17,06%.

2. Badan Pendapatan Daerah.

a. Pendapatan Denda Pajak Daerah.

Realisasi pendapatan denda pajak daerah berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp159.920.658,00. Pendapatan denda pajak daerah tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021 karena realisasi denda pajak daerah berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tidak dapat diprediksi perolehannya.

3. BKAD.

a. Pendapatan jasa giro.

Realisasi pendapatan jasa giro per sebesar Rp84.666.452,92 atau mencapai 5,64% yang berarti Rp1.415.333.547,08 atau 94,36% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00. Hal ini disebabkan dana menganggur kasda dipindahkan ke deposito. Realisasi pendapatan jasa giro anggaran 2021 sebesar Rp84.666.452,92 dibandingkan dengan realisasi pendapatan jasa giro tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.355.620.963,85 terdapat penurunan sebesar Rp1.270.954.510,93 atau sebesar 93,75%.

b. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan dari LKK.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK sebesar Rp106.912.536,22 atau mencapai 106,91% yang berarti Rp. 6.912.536,22 atau 6,91% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2021 sebesar Rp106.912.536,22 dibandingkan dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK tahun anggaran 2020 sebesar Rp128.290.315,83 terdapat penurunan sebesar Rp21.377.779,61 atau 16,66%.

c. Pendapatan Bunga Deposito.

Realisasi pendapatan bunga deposito sebesar Rp9.099.624.602,86 atau 101,11% yang berarti Rp99.624.602,86 atau 1,11% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp9.000.000.000,00. Realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2021 sebesar Rp9.099.624.602,86 dibandingkan dengan realisasi pendapatan bunga deposito tahun anggaran 2020 sebesar Rp9.026.027.396,74 terdapat peningkatan sebesar Rp73.597.206,12 atau sebesar 0,82%.

d. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi pendapatan dari pengembalian sebesar Rp168.330.911,73. Pendapatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2021. Pendapatan dari pengembalian antara lain pengembalian belanja tahun lalu baik hasil temuan BPK maupun Inspektorat. Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun anggaran 2021 sebesar Rp168.330.911,73. Pendapatan ini merupakan pengembalian kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2021.

e. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Lengkap Peraturan Daerah.

Realisasi pendapatan atas atas pelanggaran lengkap peraturan daerah sebesar Rp814.398.020,40. Pendapatan ini menampung setoran ke kas daerah atas pelanggaran prokes selama pandemi. Pendapatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2021 karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2021.

4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Pendapatan hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan berupa penjualan hasil perikanan.

Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan sebesar Rp38.983.000,00 atau mencapai 139.23% yang berarti Rp10.983.000,00 atau 39.23% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp28.000.000,00. Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2021 sebesar Rp38.983.000,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2020 sebesar Rp37.410.000,00 terdapat peningkatan sebesar Rp1.573.000,00 atau sebesar 4.20%.

5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER**5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	624.887.016.000,00	656.137.241.477,00	105,00%	632.559.647.797,00

Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan terealisasi sebesar Rp656.137.241.477,00 mencapai 105,00% yang berarti Rp31.250.225.477,00 atau 5,00% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp624.887.016.000,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp656.137.241.477,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan tahun anggaran 2020 sebesar Rp632.559.647.797,00 terjadi peningkatan sebesar Rp23.577.593.680,00 atau 3.73%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dana pembangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dana Bagi Hasil Pajak	22.563.617.000,00	33.962.127.578,00	150,52%	25.788.438.430,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	39.959.792.000,00	63.851.956.219,00	159,79%	44.866.769.518,00
Dana Alokasi Umum	465.495.171.000,00	465.495.171.000,00	100%	473.852.439.000,00
Dana Alokasi Khusus	77.945.581.000,00	72.994.976.394,00	93,65%	72.596.481.424,00
Dana Bagi Hasil Cukai	18.922.855.000,00	19.833.010.286,00	104,81%	15.455.519.425,00
Jumlah	624.887.016.000,00	656.137.241.477,00	105,00%	632.559.647.797,00

5.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	3
4.2.01.01.01				
Dana Bagi Hasil	22.563.617.000,00	33.962.127.578,00	150,52%	25.788.438.430,00

Realisasi bagi hasil pajak sebesar Rp33.962.127.578,00 atau mencapai 150,52% yang berarti Rp11.398.510.578,00 atau 50,52% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp22.563.617.000. Realisasi bagi hasil pajak tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp33.962.127.578,00 dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp25.788.438.430,00 terjadi kenaikan sebesar Rp8.173.689.148,00 atau 31,70%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi DBH Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2020 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.07/2021 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2021. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.1
Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0001 PBB	3.392.664.000,00	6.472.180.645,00	190,77%	3.215.220.537,00
4.2.01.01.01.0003 PPH Pasal 25 dan 29	19.170.953.000,00	27.489.946.933,00	143,39%	22.573.217.893,00
Total	22.563.617.000,00	33.962.127.578,00	150,52%	25.788.438.430,00

1. Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp6.472.180.645,00 atau 190,77% yang berarti Rp3.079.516.646,00 atau 90,77% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.392.664.000,00. Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2021 sebesar Rp6.472.180.645,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.215.220.537,00 terjadi kenaikan sebesar Rp3.256.960.108,00 atau 101,30%.
2. Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 sebesar Rp27.489.946.933,00 atau 143,39% yang berarti Rp8.318.993.933,00 atau 43,39% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp19.170.953.000,00. Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 tahun anggaran 2021 sebesar Rp27.489.946.933,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 tahun anggaran 2020 sebesar Rp22.573.217.893,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.916.729.040,00 atau 21,78%.

5.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	3
4.2.01.01.01				
Dana Bagi Hasil	39.959.792.000,00	63.851.956.219,00	159.79%	44.866.769.518,00

Realisasi bagi hasil bukan pajak sebesar Rp63.851.956.219,00 atau mencapai 159,79% yang berarti Rp23.892.164.219,00 atau 59,79% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp39.959.792.000,00. Realisasi bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp63.851.956.219,00 dibandingkan dengan realisasi bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp44.866.769.518,00 terjadi kenaikan sebesar Rp18.985.186.701 atau 42,31%. Pendapatan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak merupakan pendapatan yang tidak dapat dikontrol karena sangat tergantung realisasi DBH Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Sesuai dengan pagu anggaran Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2020 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.07/2021 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2021. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.2
Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01.0005 DBH SDA Minyak Bumi	36.828.695.000,00	58.560.417.583,00	159,01%	43.186.177.893,00
4.2.01.01.01.0007 DBH SDA Panas Bumi	27.552.000,00	39.874.676,00	144,73%	31.628.750,00
4.2.01.01.01.0009 DBH SDA Mineral dan Batubara Royalti	1.737.805.000,00	3.405.465.855,00	195,96%	771.296.492,00
4.2.01.01.01.0010 DBH SDA Hutan	237.421.000,00	488.578.955,00	205,79%	89.390.094,00
4.2.01.01.01.0013 DBH SDA Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	120,32%	788.276.289,00
Total	39.959.792.000,00	63.851.956.219,00	159,79%	44.866.769.518,00

1. Realisasi bagi hasil SDA Minyak Bumi sebesar Rp58.560.417.583,00 atau 159,01% yang berarti Rp21.731.722.583,00 atau 59,01% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp36.828.695.000,00. Realisasi bagi hasil SDA Minyak Bumi tahun anggaran 2021 sebesar Rp58.560.417.583,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil SDA Minyak Bumi tahun anggaran 2020 sebesar Rp43.186.177.893,00 terjadi kenaikan sebesar Rp15.374.239.690,00 atau 35,60%. Penyebab terjadinya kenaikan tersebut disebabkan meningkat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Minyak merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
2. Realisasi bagi hasil SDA Panas Bumi sebesar Rp39.874.676,00 atau 144,73% yang berarti Rp12.322.676,00 atau 44,73% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp27.552.000,00. Realisasi bagi hasil SDA Panas Bumi tahun anggaran 2021 sebesar Rp39.874.676,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil SDA Panas Bumi tahun anggaran 2020 sebesar Rp 31.628.750,00 terjadi kenaikan sebesar Rp8.245.926,00 atau 26,07%. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan bagi hasil dari Sumber Daya Alam Panas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
3. Realisasi bagi hasil SDA Mineral dan Batu Bara sebesar Rp3.405.465.855,00 atau 195,96% yang berarti Rp1.667.660.855,00 atau 95,96% lebih tinggi dibandingkan dengan target

anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.737.805.000,00. Realisasi bagi hasil SDA Mineral dan Batu Bara tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.405.465.855,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi bagi hasil SDA Mineral dan Batu Bara tahun anggaran 2020 sebesar Rp771.296.492,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.634.169.363,00 atau 341,52%. Penyebab terjadinya penurunan tersebut disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Mineral dan Batu Bara merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

4. Realisasi bagi hasil SDA Kehutanan sebesar Rp488.578.955,00 atau 205,79% yang berarti Rp251.157.955,00 atau 105,79% lebih tinggi 5,79% dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.237.421.000,00. Realisasi bagi hasil SDA Kehutanan tahun anggaran 2021 sebesar Rp488.578.955,00 apabila dibandingkan Realisasi bagi hasil SDA Kehutanan tahun anggaran 2020 sebesar Rp89.390.094,00 terjadi kenaikan sebesar Rp399.188.861,00 atau 446,57% hasil dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.
5. Realisasi bagi hasil SDA Perikanan sebesar Rp1.357.619.150,00 atau 120,32% yang berarti Rp229.300.150,00 atau 20,32% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.128.319.000,00. Realisasi bagi hasil SDA Perikanan tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.357.619.150,00 apabila dibandingkan Realisasi bagi hasil SDA Perikanan tahun anggaran 2020 sebesar Rp778.276.289,00 kenaikan sebesar Rp569.342.861,00 atau 72,23%. Bagi hasil SDA Perikanan merupakan pendapatan yang *uncontrollable*.

5.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02	465.495.171.000,00	465.495.171.000,00	100,00%	473.852.439.000,00
DAU				

Realisasi dana alokasi umum (DAU) adalah sebesar Rp465.495.171.000,00 yang mencapai 100% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp465.495.171.000,00. sesuai Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2020 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Realisasi dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp465.495.171.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi DAU tahun anggaran 2020 sebesar Rp473.852.439.000,00 terjadi penurunan

sebesar Rp8.357.268.000,00 atau 1,76%. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi umum merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi umum merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya menyajikan data-data berkaitan dengan penghitungan dana alokasi umum namun tidak berhak menentukan seberapa besar dana yang akan diterima.

5.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.02 DAU	77.945.581.000,00	72.994.976.394,00	93,65%	72.596.481.424,00

Realisasi dana alokasi khusus adalah sebesar Rp72.994.976.394,00 yang berarti 93.65% yang berarti Rp4.950.604.606,00 atau 6,35% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp77.945.581.000,00. Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2021 sebesar Rp72.994.976.394,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp72.596.481.424,00 terjadi kenaikan sebesar Rp398.494.970,00 atau 0,55%. Pendapatan yang berasal dari dana alokasi khusus merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi khusus merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.. Sesuai Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2020 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.03 DAK Fisik	7.567.929.000,00	6.704.557.644,00	88,59%	5.439.016.168,00
4.2.01.01.03 DAK Non Fisik	70.377.652.000,00	66.290.418.750,00	94,19%	67.157.465.256,00
Jumlah	77.945.581.000,00	72.994.976.394,00	93,65%	72.596.481.424,00

Sedangkan perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.1.4.1
Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2		4 = (3/2)	5
4.2.01.01.03.				
Dana Alokasi Khusus Fisik	7.567.929.000,00	6.704.557.644,00	88,59%	5.439.016.168,00
4.2.01.01.03.0002 Pendidikan Reguler SD	2.227.200.000,00	1.951.287.152,00	87,61%	0,00
4.2.01.01.03.0011 Perpustakaan Daerah	421.039.000,00	412.902.010,00	98,07%	0,00
4.2.01.01.03.0013 Kesehatan& KB Pely.Kesehatan Dasar	1.086.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
4.2.01.01.03.0014 Kesehatan& KB Pely.KesehatanRujukan	3.000.000.000,00	2.430.554.020,00	81,02%	0,00
4.2.01.01.03.0015 Kesehatan& KB Pely.Kefarmasian	833.690.000,00	668.505.756,00	80,19%	0,00
4.2.01.01.03.0025 Kesehatan& KB Reguler KB	0,00	1.055.077.706,00	0,00%	0,00
4.2.01.01.03.0030 Industri Kecil danmenengah penugasan Pembangunan	0,00	186.231.000,00	0,00%	0,00
4.2.01.01.04				
Dana Alokasi Khusus .Non Fisik :	70.377.652.000,00	66.290.418.750,00	94,19%	67.157.465.256,00
4.2.01.01.04.0008 BOP Pendidikan keselarasan	662.800.000,00	645.300.000,00	97,36%	0,00
4.2.01.01.04.0011 BOK KB-BOK	4.057.539.000,00	1.247.959.417,00	30,76%	0,00
4.2.01.01.04.15 BOKKB-BOKB	1.507.430.000,00	1.417.990.733,00	94,07%	0,00
4.2.01.01.04.0013 BOK KB-Akreditasi puskesmas	307.491.000,00	0,00	0,00%	0,00
4.2.01.01.04.0007 BO P PAUD	4.329.000.000,00	3.772.819.500,00	87,15%	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

4.2.01.01.04.0004 TPG	57.055.872.000,00	45.766.198.000,00	80,21%	0,00
4.2.01.01.04.0005 unj.peng.guru	162.000.000,00	11.451.674.000,00	7,068.93%	0,00
4.2.01.01.04 Kependudukan	835.000.000,00	765.669.000,00	91,70%	0,00
4.2.01.01.04 Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	560.000.000,00	0,00%	0,00
4.2.01.01.04	1.460.520.000,00	662.808.100,00	45,38%	0,00
Total	779.451.580.000,00	725.492.194,00	93,65%	2.596.961.424,00

5.1.2.1.5. Dana Bagi Hasil Cukai

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.01.01.01 Dana Bagi Hasil Cukai	18.922.855.000,00	19.833.010.286,00	104,81%	15.455.519.425,00

Realisasi dana bagi hasil cukai adalah sebesar Rp19.833.010.286,00 yang berarti 104,81% yang berarti Rp910.155.286,00 atau 4,81% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp18.922.855.000,00. Realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2021 sebesar Rp19.833.010.286,00 apabila dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp15.455.519.425,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.377.490.861,00 atau 28,32%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil cukai merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil cukai merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.. Sesuai Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2020 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	53.024.863.000,00	53.024.863.000,00	100,00%	73.313.029.000,00

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya yang berupa Dana Insentif Daerah /DID adalah sebesar Rp.53.024.863.000,00 yang berarti sama dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.53.024.863.000,00. Pendapatan yang berasal dari Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sesuai Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2020 tentang rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

5.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.4.01				
Dana Insentif Daerah	53.024.863.000,00	53.024.863.000,00	100,00%	73.313.029.000,00

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp.53.024.863.000,00 mencapai 100,00% yang berarti sama dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.53.024.863.000,00. Realisasi Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp.53.024.863.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp.73.313.029.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp.20.288.166.000,00 atau 27,67%.

5.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pemerintah Propinsi)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Provinsi	61.609.576.051,00	103.964.728.437,00	168,31%	85.066.731.855,00

Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah provinsi - dana perimbangan terealisasi sebesar Rp103.964.728.437,00 mencapai 168,31% yang berarti Rp42.355.150.386,00 atau 68,31% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp61.609.576.051,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan tahun anggaran 2021 sebesar Rp103.964.728.437,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi dana perimbangan tahun anggaran 2020 sebesar Rp85.066.731.855,00 terjadi peningkatan sebesar Rp18.897.996.582,00 atau 22,22%. Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah provinsi dana perimbangan sesuai dengan Keputusan gubernur Jawa Timur nomor 188/57/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kabupaten/Kota tahun anggaran 2021 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/727/KPTS/013/2021 Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/201/KPTS/013/2021 tentang Penetapan Alokasi Bagi hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I tahun anggaran 2021.

5.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.3 Dana bagi hasil pajak provinsi	61.234.672.051,00	103.062.649.437,00	168,31%	84.049.652.855,00

Realisasi dana bagi hasil pajak dari propinsi adalah sebesar Rp103.062.649.437,00 mencapai 168,31% yang berarti Rp41.827.977.386,00 atau 68,31% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp61.234.672.051,00. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan bagi hasil pajak dari propinsi merupakan kewenangan penuh dari pemerintah provinsi. Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi per 31 Desember tahun anggaran 2021 sebesar Rp103.062.649.437,00 dibandingkan realisasi dana bagi hasil pajak dari

provinsi tahun anggaran 2020 sebesar Rp84.049.652.855,00. atau terjadi kenaikan sebesar Rp19.012.996.582,00 atau 22,62%.

Perincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.3.1
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.01.0001 DBH PKB	16.599.934.811,00	38.216.405.984,00	230,22%	27.263.977.323,00
4.2.02.01.0002 DBH BBNKB	5.166.574.729,00	14.202.456.925,00	274,89%	12.318.198.181,00
4.2.02.01.0003 DBH PBBKB	11.001.529.168,00	19.076.061.233,00	173,39%	14.408.023.859,00
4.2.02.01.0004 DBH Air Permukaan	126.695.343,00	250.159.165,00	197,45%	200.953.509,00
4.2.02.01.0005 Pajak Rokok	28.339.938.000,00	31.317.566.130,00	110,51%	29.858.499.983,00
Total	61.234.672.051,00	103.062.649.437,00	168,31%	84.049.652.855,00

1. Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp38.216.405.984,00 atau mencapai 230,22% yang berarti Rp 21.616.471.173,00 atau 130,22% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp16.599.934.811,00.

Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun anggaran 2021 sebesar Rp38.216.405.984,00 dibandingkan dengan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2020 sebesar Rp27.263.977.323,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp10.952.428.661,00 atau 40,17%.

2. Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp14.202.456.925,00 atau mencapai 274,89% yang berarti Rp9.035.882.196,00 atau 174,89% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp5.166.574.729,00.

Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun anggaran 2021 sebesar Rp14.202.456.925,00 dibandingkan dengan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor

(BBNKB) tahun 2021 sebesar Rp12.318.198.181,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.884.258.744,00 atau 15,30%.

3. Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp19.076.061.233,00 atau mencapai 173,397% yang berarti Rp8.074.531.504,00 atau 73,39% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp11.001.529.168,00. Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun anggaran 2021 sebesar Rp19.076.061.233,00 dibandingkan dengan realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2020 sebesar Rp14.408.023.859,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp4.668.037.374,00 atau 32,40%.
4. Realisasi pajak air permukaan sebesar Rp250.159.165,00 atau mencapai 197,45% yang berarti Rp123.463.822,00 atau 97,45% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp126.695.343,00.

Realisasi pajak air pemanfaatan tahun anggaran 2021 sebesar Rp250.159.165,00 dibandingkan dengan realisasi pajak pemanfaatan air tahun 2020 sebesar Rp200.953.509,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp49.205.656,00 atau 24,49%.

5. Realisasi pajak rokok sebesar Rp31.317.566.130,00 atau mencapai 110,51% yang berarti Rp2.977.628.130,00 atau 10,51% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp28.339.938.000,00.

Realisasi pajak rokok per 31 Desember tahun anggaran 2021 sebesar Rp31.317.566.130,00 dibandingkan dengan realisasi pajak rokok tahun 2020 sebesar Rp29.858.499.983,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.459.066.147,00 atau 4,89%

5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemda Lainnya	374.904.000,00	902.079.000,00	240,62%	1.017.079. 000,00

Realisasi pendapatan bantuan keuangan dari propinsi sebesar Rp902.079.000,00 atau mencapai 240,62 yang berarti Rp527.175.000,00 atau 140,62 berarti lebih tinggi dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp374.904.000,00. Realisasi bantuan keuangan dari provinsi per 31Desember tahun anggaran 2021 sebesar Rp902.079.000,00 dibandingkan dengan realiasi bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.017.079.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp115.000.000,00 atau 11,31%. Realisasi pendapatan bantuan keuangan dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi berdasarkan ketetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 14 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Perincian anggaran dan realisasi bantuan keuangan dari provinsi untuk periode yang berakhir 31Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.2.3.2
Bantuan Keuangan dari Propinsi /Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penyelenggaraan pendidikan madraah diniyah dan guru swasta	79.475.000,00	476.850.000,00	600%	476.850.000,00
Pelaksanaan hari aksara	10.000.000,00	10.000.000.00	100%	10.000.000,00
Puskesmas Rawat Inap standart	0,00	0,00	0%	0,00
Pemenuhan honor kinerja kepala guru/Tk/Paud Non PNS	122.400.000,00	163.200.000.00	133,33%	163.200.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS (TK)	9.000.000,00	12.000.000,00	133,33%	12.000.000,00
BOP Madin	0,00	0,00	0,00%	75.000.000,00
Peringkatan Hari Jadi Provinsi	0,00	0,00	0,00%	50.000.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Honorarium Kinerja guru Non PNS SD	9.000.000,00	12.000.000,00	133,33%	12.000.000,00
Honorarium Kinerja guru Non PNS SMP	9.000.000,00	12.000.000,00	133,33%	12.000.000,00
Pengembangan Taman Posyandu	0,00	50.000.000,00	0,00%	55.000.000,00
Bantuan Propinsi Pendampingan Poskestren	121.029.000,00	121.029.000,00	100%	121.029.000,00
Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Pusk.rawat Inap	15.000.000,00	45.000.000,00	300%	30.000.000,00
Total	374.904.000,00	902.079.000,00	240,62%	1.017.079.000,00

5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3				
Lain-lain pendapatan yang sah	23.506.476.298,00	21.635.701.000,00	92,04%	20.029.980.000,00

Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar Rp21.635.701.000,00 atau mencapai 92,40 yang berarti Rp1.870.775.298,00 atau 7,92% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp23.506.476.298,00 Realisasi bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2021 sebesar Rp21.635.701.000,00 dibandingkan dengan realiasi bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2020 sebesar Rp20.029.980.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.605.721.000,00 atau 8,02%. Realisasi lain-lain pendapatan yang ini merupakan merupakan pendapatan yang *uncontrolable*.

Perincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah untuk periode yang berakhir 31Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.3.
Lain Lain Pendapatan Yang Sah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.03.01.01.0001 Pendapatan hibah Dana BOS	23.506.476.298,00	21.537.608.000,00	91,62%	20.029.980.000,00
4.3.03.01.02.0005 Pendapatan atas pengembalian hibah		98.093.000,00	0%	
Total	23.506.476.298,00	21.635.701.000,00	92,04%	20.029.980.000,00

5.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah

Uraian	Anggaran2021	Realisasi2021	%	Realisasi2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
4.3.03.01.01. Pendapatan Dana Hibah	23.506.476.298,00	21.635.701.000,00	92,04%	20.029.980.000,00

Penerimaan dari pendapatan dana hibah terdiri dari Pendapatan dana BOS terealisasi sebesar Rp21.537.608.000,00 atau mencapai 91.62% yang berarti Rp1.968.868.298,00 lebih rendah 8,38% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp23.506.476.298,00. Realisasi pendapatan dana hibah tahun 2021 sebesar Rp21.537.608.000,00 dibandingkan dengan realiasi pendapatan dana hibah dana bos tahun anggaran 2020 sebesar Rp20.029.980.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.507.628.000,00 atau 7.53%. dan Pendapatan atas pengembalian dana hibah terealisasi sebesar Rp98.093.000,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Pendapatan tersebut berasal dari setoran atas pengembalian atas dana hibah KONI tahun sebelumnya.